



HASIL PEMBAHASAN DESK URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
KOORDINASI TEKNIS PERENCANAAN PEMBANGUNAN TAHUN 2026
ANTARA PEMERINTAH PUSAT DENGAN PEMERINTAH DAERAH PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

Pada hari ini, Hari **Kamis** Tanggal **26** Bulan **Februari** Tahun **2026** telah dilaksanakan Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan antara Ditjen Bina Pembangunan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Kementerian PPN/ Bappenas, Kementerian Teknis yang menangani Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak, dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** telah membahas hal-hal berikut:

I LEMBAGA PEMERINTAH

- UNIT KERJA DIREKTORAT JENDERAL BINA PEMBANGUNAN DAERAH KEMENTERIAN DALAM NEGERI YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- UNIT KERJA KEMENTERIAN PPN/BAPPENAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK
- KEMENTERIAN TEKNIS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
- DINAS YANG MENANGANI URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TENGAH

II PEJABAT PEMBAHAS

NO	NAMA PEJABAT	NIP	JABATAN	INSTANSI
1	Sri Utami	196612131993032002	Analisis Kebijakan Ahli Madya	Direktorat Jenderal Bina Pembangunan Daerah Kemendagri
2	Rati Handayani	1994052320182003	Perencana Ahli Pertama, Direktorat Keluarga, Pengasuhan, Perempuan dan Anak	Bappenas
3	Dwi Budi Prasetyo S	198604052008011002	Analisis Anggaran Madya	Kementerian PPPA
4	Lifrina, ST,	197602162005012008	Penelaah Teknis Kebijakan	Bapperida Prov. Kalteng

III MENYEPAKATI HASIL DUKUNGAN PEMERINTAH DAERAH PADA URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

1. Indikator Outcome Pembangunan Tahun 2027

NO	ASTA CITA	OUTCOME	INDIKATOR OUTCOME	SATUAN	TARGET NASIONAL 2027	TARGET DAERAH 2027	TARGET INDIKATOR OUTCOME 2027
1.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif	%	85	90	
Catatan Kesepakatan :							
2.	Memperkuat pembangunan sumber daya manusia (SDM), sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda (generasi milenial dan generasi Z), dan penyandang disabilitas.	Meningkatnya efektivitas penanganan sesuai standar bagi korban KtP dan TPPO serta anak korban kekerasan, eksploitasi, penelantaran, dan perlakuan salah lainnya	Persentase Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang Mendapatkan Layanan Komprehensif	%	85	90	
Catatan Kesepakatan :							

2. Dukungan Sub Kegiatan Kewenangan Pemerintah Daerah 2027

1. PROGRAM PERLINDUNGAN PEREMPUAN



NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.08.03.1.02.00 13	Layanan pendampingan korban bagi Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	60
Catatan Pembahasan : 1. Capaian Perempuan Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan tahun 2025 sebanyak 44 Orang, sehingga Target Jumlah Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota tahun 2027 dengan target sesuai dengan usulan sebanyak 60 Orang 2. Pagu sesuai dengan usulan sebesar Rp 250.000.000 yang bersumber dari APBD 3. Target Indikator Outcome Persentase Perempuan Korban kekerasan (Termasuk TPPO) yang mendapatkan layanan komperhensif tahun 2027 sebesar 100%					
2.	2.08.03.1.03.00 11	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan Perlindungan Perempuan tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	13
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 2.08.03.1.03.0011 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi target minimal sebanyak 13 Lembaga (Penyedia layanan pada Pasal 25 Perpres UPTD PPA) dan pagu anggaran disesuaikan menjadi Rp 250.000.000 bersumber dari APBD 2. Untuk jumlah lembaga tidak bisa terbatas hanya untuk UPTD saja namun ada layanan pendukung lainnya 3. Fokuskan terhadap lembaga yang menjadi kewenangan Provinsi misalnya UPTD Provinsi					

2. PROGRAM PERLINDUNGAN KHUSUS ANAK

NO	KODE SUB KEGIATAN	NOMENKLATUR & KINERJA SUB KEGIATAN	INDIKATOR SUB KEGIATAN	SATUAN	TARGET
1.	2.08.07.1.02.00 17	Layanan pendampingan korban bagi Anak Korban Kekerasan Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan korban Tingkat Daerah Provinsi dan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	Orang	90
Catatan Pembahasan : 1. capaian layanan pendampingan Anak Korban Kekerasan tahun 2025 yang terlayani sebanyak 84 Orang, target 2027 disesuaikan menjadi 90 orang 2. Pagu sesuai dengan usulan daerah Rp.400.000.000 bersumber dari APBD 3. Target Indikator Outcome Persentase Anak Korban Kekerasan yang mendapatkan layanan komperhensif tahun 2027 sebesar 100% 4. Perlu ada perhatian khusus oleh daerah untuk kenaikan persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan pendampingan secara komperhensif serta menurunkan angka pekerja anak dan perkawinan anak					
2.	2.08.07.1.03.00 15	Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi	Jumlah Lembaga Penyedia Layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus tingkat provinsi (lembaga pemerintah dan non pemerintah) yang mendapatkan advokasi dan sosialisasi	Lembaga	13
Catatan Pembahasan : 1. Daerah akan melaksanakan sub kegiatan 2.08.07.1.03.0015 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan target sebanyak minimal 13 Lembaga (Penyedia layanan pada Pasal 25 Perpres UPTD PPA) dan pagu anggaran disesuaikan menjadi Rp 180.000.000 bersumber dari APBD 2. Agar advokasi dan sosialisasi difokuskan untuk penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi anak korban kekerasan di tingkat provinsi, seperti UPTD PPA, faskes (rumah sakit, dll), unit PPA PPO Polri, UPT di bawah Dinsos, serta lembaga layanan yang diselenggarakan oleh masyarakat, dll, guna mendukung pencapaian target persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif 3. Advokasi dan sosialisasi agar ditujukan untuk memperkuat jejaring kerja sama dan meningkatkan pemahaman bersama yang sama antar lembaga layanan di tingkat provinsi dalam memberikan layanan pada anak korban kekerasan (memperkuat proses bisnis layanan lintas sektor di provinsi dalam rangka mendukung pencapaian target persentase anak korban kekerasan yang mendapatkan layanan komprehensif) 4. Membedakan pemilihan lembaga penyedia layanan antara subkegiatan 2.08.07.1.03.0015 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan bagi Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus Kewenangan Provinsi dengan subkegiatan 2.08.03.1.03.0011 Advokasi dan sosialisasi Penguatan dan pengembangan lembaga penyedia layanan Perlindungan Perempuan Kewenangan Provinsi					

IV RINCIAN OUTPUT KEMENTERIAN/LEMBAGA

NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
1.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Fasilitasi dan Pembinaan Pemerintah Daerah tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Layanan Terpadu Sesuai Standar	Daerah	38
2.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Rujukan Akhir Perempuan Korban Kekerasan dan TPPO	Orang	180



NO	KODE RINCIAN OUTPUT	NAMA/URAIAN RINCIAN OUTPUT	SATUAN	TARGET
3.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Rujukan Anak Korban Kekerasan, Eksploitasi, dan Perlakuan Salah Lainnya	Orang	550
4.	KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK	Layanan Pengaduan Korban KtPA melalui SAPA 129	Layanan	1

V. CATATAN HASIL PEMBAHASAN

VI PENUTUP

1. JUMLAH ASTA CITA YANG DIDUKUNG	:	1
2. JUMLAH OUTCOME PRIORITAS	:	1
3. JUMLAH INDIKATOR OUTCOME PRIORITAS	:	2
4. JUMLAH PROGRAM YANG MENDUKUNG	:	2
5. JUMLAH SUB KEGIATAN YANG MENDUKUNG OUTCOME	:	4
6. JUMLAH RINCIAN OUTPUT YANG MENDUKUNG	:	4

Demikian, hasil pembahasan desk Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak pada pelaksanaan Koordinasi Teknis Perencanaan Pembangunan TA. 2027 antara Pemerintah Pusat dengan **Pemerintah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah** yang harus dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan dalam rangka mencapai target pembangunan nasional.